

Pancasila di Tengah Pertarungan Ideologi Dunia

As'ad Said Ali

Arus globalisasi dan gelombang reformasi dalam berbagai bidang telah mengakibatkan terjadinya perubahan masyarakat sangat cepat dan seringkali menimbulkan terjadinya benturan di masyarakat. Iklim keterbukaan dan kebebasan yang menyertainya melahirkan berbagai peristiwa sosial, politik dan kebudayaan yang cukup signifikan berpengaruh terhadap masalah ideologi Negara.

Terjadinya penurunan moral bangsa, munculnya fenomena kekerasan, sikap-sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok, merebaknya pemahaman agama secara ekstrim dan fanatis, konflik-konflik yang merebak di sejumlah daerah dan permasalahan sosial lainnya, dapat dijadikan indikasi bahwa ideologi Negara di negeri ini sudah memudar dan menunjukkan adanya problem identitas yang mengancam keutuhan bangsa dan jalannya demokrasi.

Jika dicermati, berbagai rangkaian peristiwa politik, sosial, ekonomi dan keamanan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, dapat ditemukan jawaban kenapa ideologi nasional memudar dan berbagai pihak sering mempertanyakan kelangsungan Indonesia sebagai bangsa dan Negara. Pokok

permasalahannya adalah bahwa kita tidak menyadari adanya suatu perang ideologi yang dibarengi dengan perang kepentingan di dunia yang menjadikan Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia sebagai wilayah atau medan peperangan tersebut. Perang ideologi dan perang kepentingan yang meliputi politik, ekonomi dan sosial budaya itu terjadi sekaligus dan saling kait mengkait. Negara-negara industri yang haus untuk mengeksploitasi habis sumber-sumber ekonomi Negara berkembang memaksa Negara-negara lain mengikuti arus globalisasi. Di dalam arus globalisasi itulah Negara-negara lain untuk mengikuti cara berpikir mereka dan sistem politik, sosial, ekonomi mereka. Demokrasi, baik yang diusung oleh kaum demokrat liberal maupun demokrat sosial (Sosdem) dijajakan secara setengah paksa terhadap Negara atau masyarakat dunia ketiga dengan bungkus globalisasi.

Negara-negara sedang berkembang dianggap terbelakang secara ekonomi jika tidak mengikuti sistem politik, ekonomi dan sosial mereka. Respon Negara-negara berkembang terhadap tekanan tersebut berlainan satu sama lain. Sebagian tetap tegar pada ideologi dan sistem sendiri dengan cara mengisolasi

atau melakukan penyesuaian-penyesuaian tetapi tetap berpegang teguh pada konsepsi nasional masing-masing. Sebagian lagi, mengikuti apa yang menjadi kemauan Negara-negara besar karena tidak tahu cara melepaskan diri dari jerat Negara-negara besar tersebut. Sebagian Negara atau masyarakat lainnya mempunyai kesadaran untuk melawan kemauan Negara-negara Barat. Mereka yang melawan ini dibagi menjadi dua, yakni mereka yang berperang habis-habisan dengan keyakinan untuk menghancurkan Negara-negara besar sebagai satu-stunya jalan untuk melepaskan cengkeraman ideologi Barat. Al Qaeda dan sejenisnya dapat digolongkan ke dalam kelompok ini. Kelompok lainnya yang berusaha melawan Barat adalah kaum nasionalis di berbagai Negara yang berusaha menahan arus tekanan Barat di segala bidang dengan cara membangkitkan segenap kekuatan spiritual dan material bangsa agar bangsa tersebut tetap *survive* dan tetap bermartabat serta berkepribadian.

Ideologi besar dunia yang diwakili demokrasi liberal dan demokrasi sosial saling bersaing untuk menyulap dunia ketiga sebagai bagian dari mereka. Al Qaeda dan sejenisnya yang menjadikan "Islam" sebagai ideologi perjuang-

an dan *jihad qital* sebagai metode perjuangan dianggap sebagai musuh bersama oleh kaum demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Jihad Qital sebagai ideologi perlawanan terhadap Barat bukanlah monopoli kelompok muslim ekstrim tetapi juga diminati oleh orang-orang non muslim yang menentang faham-faham liberal dan sosialis misalnya berbagai kasus aksi teror yang digerakkan oleh orang-orang Barat yang sebelumnya Kristen kemudian masuk Islam. Indonesia sebagai kawasan dengan potensi sosial dan ekonomi yang sangat besar menjadi ajang peperangan mereka. Secara tidak disadari sebagian dari masyarakat kita telah menjadi sekutu ketiga bentuk ideologi tersebut. Tidak sedikit para elit nasional secara lantang menyuarakan kepentingan dari paham demokrasi liberal dan demokrasi sosial tanpa saringan. Mereka yang sangat berupaya ingin menjual BUMN strategis tanpa mempertimbangkan hajat hidup rakyat banyak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah salah satu contoh pengikut atau mereka yang terpengaruh paham demokrasi liberal. Sedangkan mereka yang sering meneriakkan referendum di daerah konflik merupakan contoh mereka yang menjadi pengikut demokrasi sosial.

Sesungguhnya demokrasi liberal dan demokrasi sosial mengandung nilai positif sepanjang aplikasinya sesuai dengan nilai yang tumbuh di masyarakat, tetapi manakala nilai dan aspirasi masyarakat diabaikan sebagaimana contoh di atas maka kedua faham tersebut menjadi sumber permasalahan di Negara ini. Mengabaikan muatan nasional dan lokal dalam penerapan suatu ideologi sama dengan mempersilahkan pihak asing menguasai jalan pikiran kita. Baik Negara-negara Barat yang mengikuti demokrasi liberal maupun demokrasi sosial sebenarnya mempunyai tujuan sama, yakni agar pengaruh dan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi di Indonesia dapat mereka raih. Lawan kelompok demokrasi tersebut adalah mereka yang mempergunakan simbol-simbol Islam sebagai slogan perjuangan di mana sebagian tampil secara vulgar dalam bentuk aksi teror. Sebagian yang lainnya melakukan perlawanan dengan saluran sosial dan politik dengan mengadopsi paham-paham radikal Islam Timur Tengah. Benturan ketiga ideologi dari luar itulah yang mempengaruhi kehidupan politik dan keamanan di negeri ini. Kalau tidak hati-hati menyikapinya, bukan tidak mungkin Indonesia terhapus dari peta dunia. Terorisme yang tidak dapat dikendalikan akan

mendorong campur tangan Negara asing bahkan mungkin dalam bentuk fisik. Liberalisme tanpa batas akan menimbulkan anarkhi dan kekacauan di segala bidang. Sedangkan gagasan-gagasan pengikut Sosdem tentang referendum dan desentralisasi yang sangat besar tanpa dilandasi oleh pemerintah pusat yang efektif akan menyebabkan disintegrasi nasional.

ANATOMI KONFLIK (KEPENTINGAN) IDEOLOGI

Kaum demokrat liberal menghendaki Negara-negara dunia ketiga melakukan perubahan sistem politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Perubahan sistem politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi Barat, seperti otonomi yang seluas-luasnya bahkan jika perlu pemisahan daerah tertentu dari NKRI. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan-kepentingan ekonominya dapat masuk ke beberapa daerah tertentu dengan mudah karena mempunyai daya tawar lebih besar dibanding kalau menghadapi pemerintah pusat yang kuat. Bahkan mereka terus berupaya mengurangi dominasi Negara yang dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam berpolitik, misalnya dengan penghapusan kewenangan Negara untuk

membubarkan organisasi, meskipun organisasi itu membahayakan bagi kelangsungan Negara.

Hal yang sama juga dilakukan oleh kaum demokrat sosial. Perbedaannya hanya terletak pada cara dan sarana yang dipakai dalam merebut pengaruh politik, menguasai sumber-sumber ekonomi dan mempengaruhi simpati dan pemikiran masyarakat. Tujuan dari kedua kaum demokrat tersebut adalah peranan Negara yang terbatas dan peranan swasta yang kuat terutama sektor bisnis serta membiarkan mekanisme pasar bekerja, melakukan deregulasi dengan mengurangi segenap restriksi pada industri, mencabut semua rintangan birokrasi perdagangan, dan mencabut atau menghilangkan tarif bagi perdagangan demi terjaminnya *free trade*. Sebenarnya selama *free trade* dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat menengah dan kecil tidaklah menjadi persoalan, masalahnya adalah banyak elite yang sering mengabaikan kepentingan rakyat banyak karena terlanjur terperangkap oleh pemikiran Barat.

Dalam bidang sosial budaya mereka mengupayakan adanya kebebasan pers yang sangat luas dan liberalisasi kehidupan beragama yang berlebihan. Hal

ini berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga pemikiran dan gaya hidup masyarakat tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai agama dan tradisi. Hal ini berdampak bagi luntuhnya jatidiri bangsa yang selama ini menjunjung kehidupan yang religius. Selain itu, dengan desentralisasi yang berlebihan juga telah mendorong menguatnya rasa primordialisme atau semangat identitas kedaerahan yang mengancam bagi integrasi bangsa. Semangat desentralisasi daerah yang berlebihan justru menjadi pemicu konflik horizontal yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa. Apalagi semangat identitas kedaerahan tersebut pada dasarnya tidak diiringi dengan kesiapan bagi daerah tersebut dalam menjalankan pemerintahan sendiri dan menghadapi kepentingan pertarungan ideologi dunia.

Adapun metode yang digunakan adalah melakukan tekanan ekonomi, pembentukan opini melalui media massa dan pengendalian kaum intelektual dengan berbagai isu seperti HAM, Lingkungan Hidup, demokratisasi dan sederet isu turunannya. Tekanan-tekanan tersebut dilakukan baik melalui kebijakan luar negeri maupun melalui jalur-jalur NGO-NGO. Kebijakan embargo dan sejenisnya atau kebijakan

dengan cara meminjam tangan lembaga-lembaga internasional (IMF, World Bank dll) merupakan alat untuk menekan Negara-negara sedang berkembang. NGO-NGO asing melalui lembaga-lembaga "funding" mengikat NGO-NGO nasional untuk menyuarakan kepentingan mereka melalui perubahan UUD, UU dan berbagai peraturan. Peranan *Multinational corporation* dalam hal ini juga tidak kecil terutama dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi dan sekaligus pengendalian terhadap elite politik pusat dan daerah.

Sekalipun secara ideologi keduanya paralel yakni melebarkan sayap demokrasi tapi tidak diragukan lagi adanya benturan kepentingan di antara mereka. Kaum demokrat liberal dalam menancapkan pengaruhnya di Indonesia menekankan pada terjadinya perubahan sistem politik dengan cara mempengaruhi kalangan DPR dan intelektual. Sedangkan kaum demokrat sosial memprioritaskan pada penguatan elemen-elemen masyarakat madani (*civil society*). Benturan di antara kaki tangan mereka sering terjadi, misalnya pengungkapan hal-hal negatif dari masing-masing kelompok, contohnya kasus pencemaran lingkungan hidup PT Newmont. Contoh lain adalah kaum liberal mendorong pembentukan MRP

di Papua sebagai awal pembentukan sistem bikameral sebagai embrio Negara federal. Sedang kaum demokrat sosial tidak mau kalah dengan mendorong terwujudnya otonomi seperti model "Aceh".

Di pihak lain, berbagai kepentingan dari kedua kaum demokrat tersebut tidak selamanya memberikan kebaikan atau kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Titik balik dari berbagai kepentingan kaum demokrat liberal dan demokrat sosial adalah munculnya perlawanan yang tidak jarang dengan cara kekerasan. Salah satu perlawanan itu muncul dari kaum jihadi Indonesia yang menebarkan aksi terorisme.

Kaum jihadi bersikeras menghilangkan pengaruh Barat terutama AS. Teror atau Jihad *qital* (jihad dalam pengertian membunuh) menjadi simbol dan metode perlawanan dalam memperjuangkan Islam yang *Kaffah* (totalistik) dan menegakkan syari'at Islam sebagai hukum Negara dan Islam sebagai dasar Negara, sehingga cita-citanya adalah membangun Negara Islam dan *Khilafah Islamiyah*. Praktik keagamaannya cenderung puritanisme dan menentang nasionalisasi ajaran Islam, sehingga mereka sangat memusuhi apapun yang bersifat sekuler dari Barat.

Kaum jihadi juga terus berupaya melancarkan tekanan-tekanan sosial politik yang tidak jarang dengan cara kekerasan untuk mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Bentuk-bentuk teror mereka arahkan sebagai hantaman bagi kekuatan demokrasi, menolak sikap-sikap liberal dalam bidang moralitas, gaya hidup, dan politik. Sedangkan untuk memperoleh pengaruh dan kekuatan massa, mereka membentuk kelompok-kelompok masyarakat Islam yang eksklusif. Eksklusifitas ini mengakibatkan diaspora sel-sel kaum jihadi dalam bentuk Islam militan atau ekstrim yang memolitisir "Islam" sebagai ideologinya. Sehingga memungkinkan kaum jihadi ini melakukan interaksi dan jaringan dengan kelompok-kelompok masyarakat Islam Timur Tengah yang memiliki kesamaan dalam misi dan garis perjuangannya, terutama Al Qaeda.

Jelas kiranya, benturan ketiga ideologi luar itu menimbulkan distabilisasi. Teror sebagai metode melawan pengaruh demokrasi liberal dan demokrasi sosial dapat kita rasakan *madharatnya*. Unjuk rasa tanpa alasan kuat di berbagai perusahaan yang bersifat nasional menghambat perekonomian. Berbagai produk perundangan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat

misalnya amandemen UUD 1945 yang kebablasan menimbulkan keresahan politik termasuk mereka yang pernah memperjuangkan perubahan tersebut.

BAGAIMANA KAUM PANCASILAIS MENGHADAPI ?

Sejak era reformasi, kaum pancasilais terlena oleh proses demokratisasi karena tidak begitu memahami peta pertarungan ideologi dunia. Sebenarnya, sudah ada kesadaran untuk bangkit, tapi ada ketakutan dianggap pendukung Orde Baru karena selama ini terdapat stigma bahwa Pancasila sama dengan Orde Baru. Bahkan mereka terpecah-pecah dan tersebar ke dalam berbagai kekuatan politik. Oleh karena itu, perlu adanya langkah bersama dalam misi dan perjuangan yang terpadu untuk menghadapi pertarungan ideologi dunia tersebut agar dapat meneruskan keberlangsungan bangsa Indonesia yang bermartabat dan berkepribadian. Menyimak berbagai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak tersirat keinginan dan tekad beliau untuk bersama-sama membangun kembali kekuatan dan kebersamaan bangsa di tengah pertarungan ideologi dan kepentingan Negara-negara besar. Sebagai contoh kabinet SBY disebut Kabi-

net Indonesia Bersatu dan Presiden juga telah mencanangkan pekan budaya nasional.

Indonesia melalui Pancasila yang merupakan ideologi terbuka terus melakukan persesuaian dan pengadopsian berbagai perkembangan yang positif dari berbagai ideologi dunia. Oleh karena itu, penyaringan (*filterisasi*) dan penemuan kembali (*reinvention*) tradisi harus tetap dilakukan agar tidak tergilas dan terombang-ambing oleh pertarungan politik global tersebut. Upaya penyaringan itu harus bersumber pada ideologi Negara kita Pancasila yang telah menjadi falsafah Negara dan menjadi konsensus bersama. Sebagai falsafah Negara, Pancasila mempunyai nilai-nilai dasar yang dapat menjadi saringan ideologi luar negeri yang masuk, karena kelima sila dalam Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang pada dasarnya mengandung sejumlah nilai-nilai utama yang meliputi ciri khas bangsa Indonesia. Nilai dasar itu ternyata relevan dengan paradigma "demokrasi". Singkatnya, Pancasila mengandung beberapa filter yang diharapkan mampu menyaring arus masuknya ideologi dari luar dan bukan menafikannya. Nilai-nilai utama itu adalah *tauhid*, toleransi, pluralistik, moderat dan seimbang.

Dengan *Tauhid* sebagai nilai pertama, kita menghayati keesaan Tuhan dari perspektif agamanya masing-masing dan tidak diperkenankan untuk melakukan perbandingan apalagi menilai agama lain. Ketauhidan ini tepatnya untuk membangun kehidupan yang religius berdasarkan nilai-nilai agama masing-masing dan bukan berarti harus menyamakan semua agama.

Kedua, *Tasamuh* (toleransi), terutama dalam kehidupan beragama dan bersuku bangsa, akan meminimalisir terjadinya politisasi agama, radikalisme agama dan primordialisme kedaerahan. Jika sikap keberagaman tidak memiliki nilai-nilai *tasamuh*, tentu akan membentuk suatu fanatisme yang berlebihan.

Ketiga, *Ta'addudiyah*/pluralistik, bahwa suatu pengakuan atas berbagai perbedaan agama, berbagai bangsa, suku, ras dan lain sebagainya agar selalu berhubungan dan menjalin *ta'aruf* (komunikasi dan solidaritas), merupakan prasarat utama bagi tegaknya toleransi.

Keempat, *Tawasuthh* (moderat), bahwa sikap moderat ini terkait dengan sikap keterbukaan bangsa Indonesia terhadap berbagai perkembangan dunia. Namun demikian, sikap moderasi ini tidak ber-

jalan sendiri. Selain berdasarkan prinsip-prinsip religius dan pluralis, juga dibarengi dengan keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan.

Tawazun sebagai paradigma kelima, memberikan suatu batas bagi kebebasan (liberalisme) agar tidak kebablasan dan sangat dibutuhkan agar tidak memunculkan sifat fanatisme, ekstrimisme dan radikalisme.

Dalam kaitan ini reorientasi dan reaktualisasi falsafah Negara Pancasila lewat pendekatan *tauhid*, *tasamuh*, *ta'addudiyah*, *tawasuth* dan *tawazun* menjadi cukup kontekstual dan perlu dicoba untuk diimplementasikan dalam menghadapi pertarungan ideologi dunia. □